

# ▶ **RENCANA STRATEGIS** **2014-2017**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH  
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (BPKBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2014 – 2017 yang mengalami beberapa perubahan untuk penyempurnaan. Dengan penuh keterbukaan kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Renstra ini dapat bermanfaat khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (BPKBD) dan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada umumnya.

Tasikmalaya, 4 Januari 2016  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah  
Kota Tasikmalaya

TTD

**Drs. H. NANA SUJANA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680803 198903 1 004

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKBD	7
2.1. Tugas, Fungsi Struktur Organisasi	7
2.1.1. Tugas Fungsi	7
2.1.2. Struktur Organisasi	17
2.2. Sumber Daya	19
2.2.1. Susunan Kepegawaian	19
2.2.2. Perlengkapan	20
2.3. Kinerja Pelayanan BPKBD	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKBD	24
2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan BPKBD	24
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan BPKBD	24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	25
3.2. Analisis SWOT	25
3.2.1. Analisis Lingkungan Internal	25
3.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal	26
3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.4. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia	35
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis	54
BAB IV VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	56
4.1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah	56
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	57
4.3. Strategi dan Kebijakan	61
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	64
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPKBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN	105
BAB VII PENUTUP	107

## DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan	19
Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	19
Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.4. Perlengkapan Sarana Pendukung Kerja BPKBD	20
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKBD Kota Tasikmalaya	21
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKBD Kota Tasikmalaya	27
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36
Tabel 3.3. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya	39
Tabel 3.4. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya	49
Tabel 3.5. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kota Tasikmalaya	53
Tabel 3.6. Identifikasi Isu-Isu Strategis	54
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	58
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	62
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif BPKBD	65
Tabel 6.1. Indikator Kinerja BPKBD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	105

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1. Hubungan Renstra BPKBD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	5
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah	18

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan. Secara khusus Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Sesuai dengan amanat UU No. 25/2004 tersebut maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renstra SKPD tersebut disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Renstra SKPD baik dalam substansi maupun sistematikanya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Kota Tasikmalaya 2013-2017 ini antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 TAHUN 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6S eri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 -2013;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);

26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144).

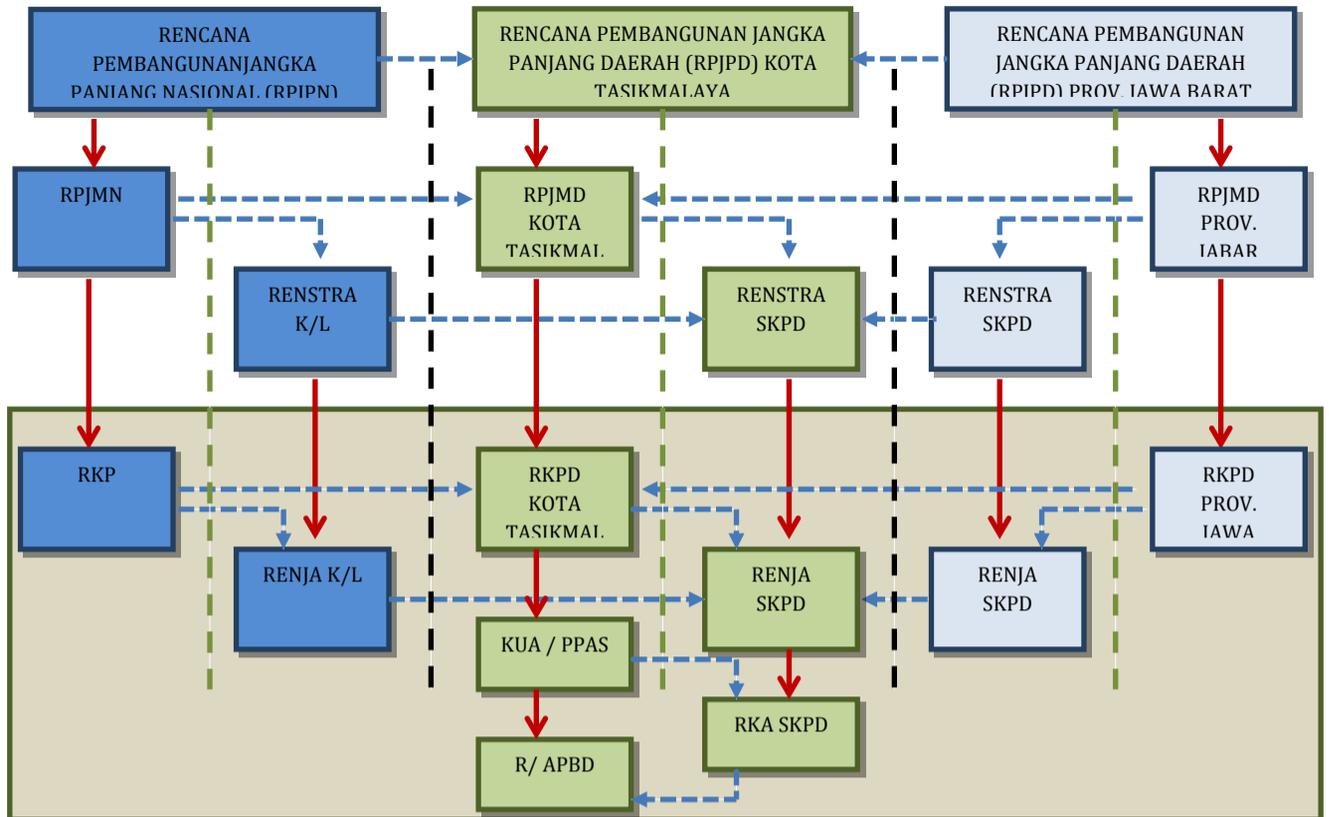
### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis BPKBD Kota Tasikmalaya 2014-2017, adalah sebagai gambaran dan tolak ukur rencana program/kegiatan empat tahun, karena BPKBD merupakan SKPD baru yang terbentuk pada Tahun 2013 sesuai Perda Kota Tasikmalaya Nomor 6 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan sebagai alat bantu bagi bidang-bidang yang ada di BPKBD untuk secara konsekuen dan konsisten dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun tujuannya adalah sebagai upaya untuk memantapkan program prioritas BPKBD dalam turut mendukung suksesnya sasaran pembangunan daerah yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya 2013-2017 agar bersinergi dengan perencanaan pembangunan di lingkup regional dan nasional.

### **1.4. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Rencana Strategis BPKBD merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya dalam bidang perencanaan. Keberadaan Renstra akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKBD yang dalam penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKBD. RKA secara substansi akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



Gambar 1. 1. Hubungan Renstra BPKBD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis BPKBD Kota Tasikmalaya 2014-2017, meliputi telaahan terhadap lingkungan organisasi BPKBD Kota Tasikmalaya, baik internal maupun eksternal, Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan yang ingin dicapai organisasi di masa datang, strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun sistematika penyusunan Rencana Strategis BPKBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan Renstra BPKBD Kota Tasikmalaya 2014-2017.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKBD**

Memuat informasi secara rinci tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Badan Daerah.

#### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPKBD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Keuangan, Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

Berisi uraian tentang visi dan misi BPKBD, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan empat tahunan BPKBD.

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif rencana program/ kegiatan empat tahunan BPKBD.

**BAB VI INDIKATOR KINERJA BPKBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berisi uraian tentang indikator kinerja BPKBD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RJPMD 2013-2017.

**BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BPKBD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi Struktur Organisasi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (BPKBD) Kota Tasikmalaya di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut BPKBD mempunyai kedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Dalam peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, fungsi dan rincian tugas unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi keuangan daerah. Dengan fungsi melaksanakan :

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan barang daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

Sebagai arah dan pedoman yang jelas dalam penataan organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, serta untuk menunjang koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan secara internal, lebih lanjut dijabarkan tugas pokok masing-masing sub unit organisasi .

##### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengkoorganisasikan, menegendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan.

Rincian Tugas Kepala Badan:

- a. Menyenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;
- b. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. Menyenggarakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. Menyenggarakan pengelolaan barang daerah;
- e. Menyenggarakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan barang daerah;

- f. Menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan sistem informasi keuangan dan barang daerah;
- g. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan barang daerah;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris daerah;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan dan umum.

Rincian Tugas Sekretaris :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja sekretariat;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan badan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatausahaan di lingkungan badan;
- d. Menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya dibidang keuangan;
- e. Menyelenggarakan data statistik, dibidang keuangan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja badan;
- g. Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan ketatalaksanaan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan ketatausahaan dilingkungan Badan;
- c) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Badan;

- d) Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Badan;
- e) Melaksanakan pengelolaan badan milik daerah dilingkungan Badan;
- f) Mengelola kepegawaian dilingkungan Badan;
- g) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan dilingkungan badan;
- h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j) Melaksanakan tugaskedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan;

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) Melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
- c) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
- e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja badan;
- c) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja badan;
- d) Menyusun data statistik yang berhubungan dengan bidang keuangan beserta dengan penunjangnya;
- e) Melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang keuangan beserta penunjangnya
- f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### 3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penyusunan anggaran pemerintah daerah.

Rincian tugas Bidang Anggaran :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Anggaran;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja;
- c. Menyelenggarakan penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan anggaran dan perubahan APBD;
- d. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD serta pengesahannya;
- e. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan penyusunan anggaran;
- g. Penyiapan rencana dan rancangan peraturan daerah pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/ investasi dan pemberian pinjaman daerah;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Anggaran;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

- a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Anggaran Pendapatan;

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
- b) Menyiapkan data rencana pendapatan dan pembiayaan daerah dalam penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c) Menyiapkan rencana pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/investasi daerah dan pemberian pinjaman daerah;
- d) Menyiapkan bahan pengendalian terhadap penyertaan permodalan dan anggaran pembiayaan daerah;
- e) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang perkembangan penyertaan permodalan/investasi daerah dan pembiayaan daerah;
- f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Anggaran Pendapatan;

- g) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- b. Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan anggaran Belanja Daerah.
- Rincian tugas Sub Bidang Anggaran Belanja:
- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Anggaran Belanja;
  - b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
  - c) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan APBD;
  - d) Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan APBD;
  - e) Menerima dan mengolah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - f) Menerima dan mengolah Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) OPD dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - g) Menganalisa rencana anggaran belanja daerah;
  - h) Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan anggaran;
  - i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Anggaran Belanja;
  - j) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### **4. Bidang Perbendaharaan**

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kebijakan teknis perbendaharaan keuangan daerah.

Rincian tugas Bidang Perbendaharaan:

- a. Penyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perbendaharaan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konsep petunjuk teknis perbendaharaan dan verifikasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengelola kegiatan perbendaharaan keuangan daerah;
- d. Penyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dalam penyelenggaraan perbendaharaan keuangan daerah;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perbendaharaan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- a. Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan kas daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Kas Daerah:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Kas Daerah;
  - b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kas daerah;
  - c) Menerima pengajuan SPM dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - d) Memeriksa SPM dan kelengkapannya;
  - e) Memeriksa keabsahan SPM dan kelengkapannya;
  - f) Memeriksa ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah daerah dan pagu dana pada APBD;
  - g) Menyiapkan rancangan SP2D;
  - h) Melaksanakan sinkronisasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada SKPD (dalam rangka Rekonsiliasi Pengeluaran);
  - i) Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - j) Menyimpan uang daerah;
  - k) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - l) Menyiapkan laporan kas posisi harian, setiap akhir jam kerja, posisi mingguan dan bulanan;
  - m) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Kas Daerah;
  - n) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- 
- b. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan belanja tidak langsung.

Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;
- c) Melaksanakan verifikasi untuk pengeluaran belanja tidak langsung;
- d) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan untuk pencairan belanja tidak langsung;
- e) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;
- f) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## 5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah.

Rincian tugas Bidang Akuntansi:

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Akuntansi;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah;
- c. Menyelenggarakan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
- d. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
- e. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Akuntansi;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

- a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan akuntansi pendapatan.

Rincian tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
  - b) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pendapatan pemerintah daerah maupun akuntansi pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - c) Melaksanakan penatausahaan pembukuan akuntansi pendapatan berdasarkan transaksi dan bukti-bukti yang sah;
  - d) Memeriksa dan menghimpun laporan realisasi pendapatan setiap satuan kerja;
  - e) Menyiapkan bahan berkaitan dengan akuntansi pendapatan dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
  - f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
  - g) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- b. Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan akuntansi belanja.

Rincian tugas Sub Bidang Akuntansi Belanja:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Sub Bidang Akuntansi Belanja;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi belanja pemerintah daerah maupun akuntansi belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c) Melaksanakan penatausahaan pembukuan akuntansi pengeluaran kas, aset dan selain kas pada SKPKD berdasarkan transaksi dan bukti-bukti yang sah;
- d) Melaksanakan perhitungan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SILPA);
- e) Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah;
- f) Melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPKD dengan laporan keuangan SKPD;
- g) Memeriksa dan menghimpun laporan realisasi anggaran setiap satuan kerja;
- h) Melaksanakan penyusunan laporan arus kas secara periodik kepada Walikota;
- i) Membuat laporan realisasi keuangan setiap semester (penyusunan laporan semester);
- j) Menyiapkan Laporan Keuangan Tahunan berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k) Menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD;
- l) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Akuntansi Belanja;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## 6. Bidang Pengelolaan Barang Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan pengelolaan barang daerah.

Rincian tugas Bidang Pengelolaan Barang Daerah:

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pengelolaan Barang Daerah;
  - b. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan barang daerah;
  - c. Menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan kegiatan pengelolaan barang daerah;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah;
  - e. Menyelenggarakan penyusunan informasi yang menyangkut kegiatan pengelolaan barang daerah sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Menyiapkan bahan keputusan di bidang perencanaan/analisa kebutuhan, penyimpanan dan distribusi serta penilaian barang daerah;
  - g. Menyelenggarakan penatausahaan neraca barang daerah dan investasi daerah;
  - h. Menyelenggarakan penilaian dan penyusunan neraca barang daerah;
  - i. Menyelenggarakan proses tuntutan ganti rugi;
  - j. Menyelenggarakan penataan barang daerah
  - k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pengelolaan Barang Daerah;
  - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan serta penatausahaan barang daerah.
- Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Daerah:
- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Daerah;
  - b) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan dan analisa kebutuhan;
  - c) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis perolehan barang daerah;
  - d) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data mengenai perencanaan dan analisa kebutuhan barang daerah;
  - e) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang;
  - f) Melaksanakan penganalisaan kebutuhan perlengkapan, menyusun pengaturan serta memeriksa kelengkapan data berkas pengadaan barang;

- g) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan, fasilitasi dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
  - h) Melaksanakan penyusunan/merekap RKBMD dan RKPBMMD dari masing-masing organisasi perangkat daerah menjadi DKBMD dan DKPBMMD;
  - i) Melaksanakan penyusunan RTBU, RKBUD dan DKB;
  - j) Melaksanakan pelayanan sistem informasi barang daerah (SIMBADA);
  - k) Melaksanakan sensus barang daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - l) Melaksanakan penyusunan daftar pengadaan barang semesteran dan tahunan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
  - m) Melaksanakan penilaian dan penyusunan neraca barang daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
  - n) Melaksanakan inventarisasi barang milik pemerintah daerah
  - o) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Daerah;
  - p) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - q) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- b. Sub Bidang Penataan dan Pendayagunaan Barang Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penataan serta pendayagunaan barang daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Penataan dan Pendayagunaan Barang Daerah:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Penataan dan Pendayagunaan Barang Daerah;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan pendayagunaan barang daerah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;
- c) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemindahtanganan dan penghapusan barang daerah;
- d) Melaksanakan pemeliharaan barang-barang daerah yang berada dalam gudang induk di daerah;
- e) Melaksanakan pengamanan barang daerah dan/atau pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah daerah;
- f) Melaksanakan pengaturan dan penyimpanan bukti sah kepemilikan atau sertifikat kekayaan daerah;
- g) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Penataan dan Pendayagunaan Barang Daerah;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

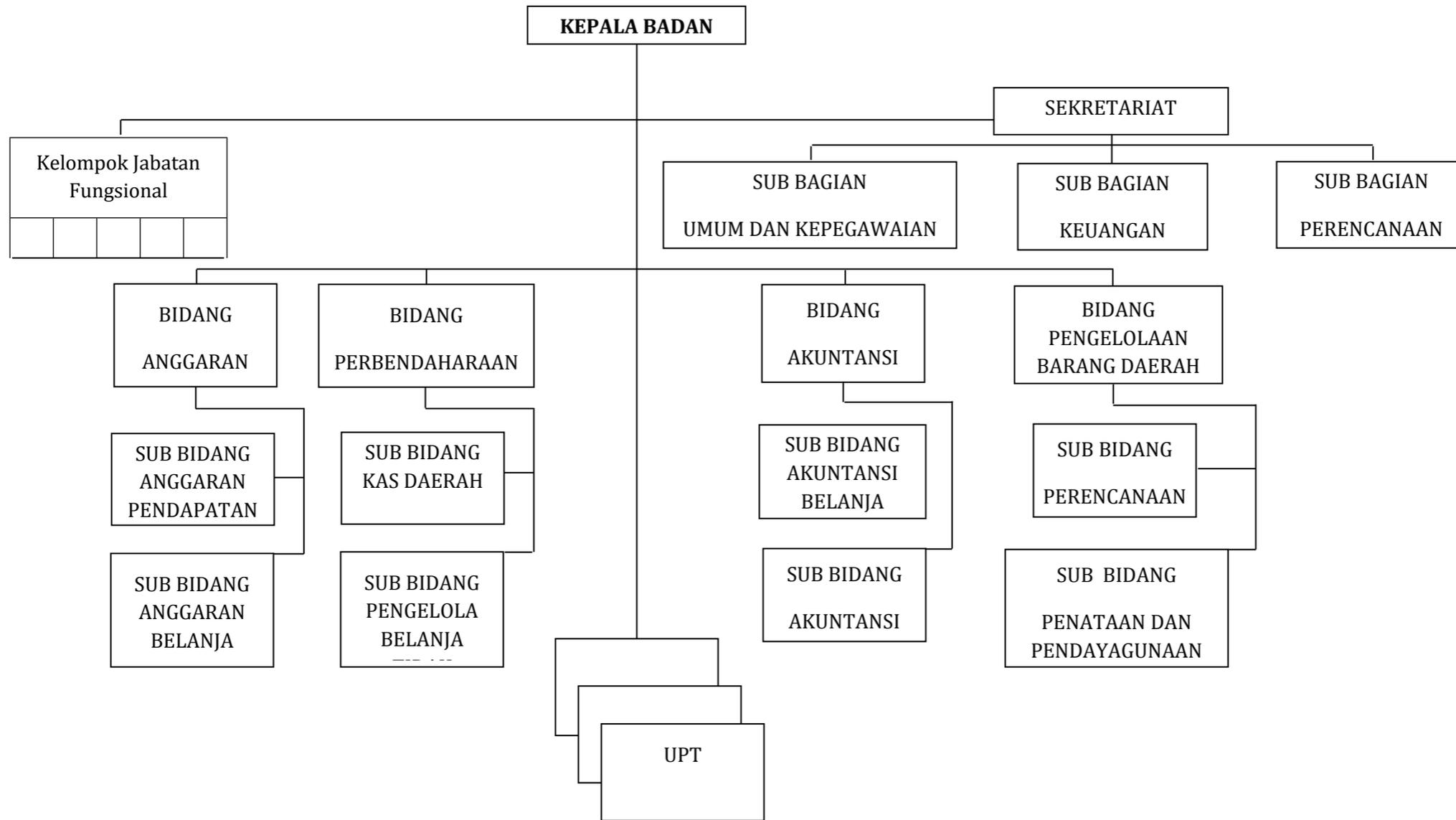
### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi BPKBD Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 terdiri dari 5 ( lima ) Sub unit organisasi eselon 3 dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
3. Bidang Anggaran membawahkan :
  - a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan
  - b. Sub Bidang Anggaran Belanja
4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Kas Daerah
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
5. Bidang Akuntansi, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan
  - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja
6. Bidang Barang Daerah, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Daerah
  - b. Sub Bidang Penataan dan Pendayagunaan Barang Daerah

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Barang Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut :

**GAMBAR 2.1.**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**



## 2.2. Sumber Daya

Badan Pengelolaan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Secara kuantitas jumlah pegawai BPKBD sampai saat ini dirasakan belum mencukupi demikian pula dari aspek kualitas dalam hal ini jenjang pendidikan.

### 2.2.1. Susunan Kepegawaian

Komposisi Pegawai BPKBD Kota Tasikmalaya Januari 2014 dapat dilihat berdasarkan kelompok jabatan pada tabel 2.1. berdasarkan golongan pada tabel 2.2. serta berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

NO	KEL. JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon II B	1		1
2	Eselon III A	1		1
3	Eselon III B	4		4
4	Eselon IV A	6	5	11
5	Staf / Pelaksana	22	16	38
6	Jabatan Fungsional	-	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>21</b>	<b>55</b>

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	5	1	6
2	Golongan III	18	14	32
3	Golongan II	11	6	17
4	Golongan I	-	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>21</b>	<b>55</b>

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	DOKTORAL (S3)			
2	MAGISTER (S2)	5	3	8
3	SARJANA (S1)	15	8	23
4	D IV	-	-	-
5	D3	1	5	6
6	D1	-	-	-
7	SLTA	12	5	17
8	SLTP	-	-	-
9	SD	1	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>21</b>	<b>55</b>

### 2.2.2. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki oleh BPKBD Kota Tasikmalaya yang merupakan sarana pendukung kerja Tahun 2014 perinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perlengkapan Sarana Pendukung Kerja BPKBD

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Kendaraan Roda 4	6	Baik
2	Kendaraan Roda 2	11	Baik
3	Laptop / Notebook	12	Baik
4	Komputer Dekstop / PC	7	Baik
5	Mesin Tik	-	
6	Faxmile	-	
7	Brankas	1	Baik
8	Printer	6	Baik
9	Scanner	-	
10	Kamera	4	Baik
11	LCD Proyektor	1	Baik
12	HandyCam	-	
13	Pesawat Telepon	-	
14	Meja Biro	-	
15	Meja Setengah Biro	10	Baik
16	Kursi Meja Eselon II	-	
17	Kursi Meja Eselon III	-	
18	Kursi Meja Eselon IV	-	
19	Filling Cabinet / Locker	8	Baik
20	Sofa	-	
21	Lemari Arsip	8	Baik
22	Pesawat Telepon	-	
23	Rak Buku	-	
24	Meja Rapat	2	Baik
25	UPS	1	Baik
26	Alat Penghancur Kertas	1	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan BPKBD

Pencapaian kinerja pelayanan BPKBD dapat dilihat pada Tabel 2.5. sebagai berikut :



**Tabel 2.5.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah**  
**Kota Tasikmalaya**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Waktu Penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya yang Tepat Waktu				31 Desember 2014 (100%)	31 Desember 2015 (100%)	31 Desember 2016 (100%)	31 Desember 2017 (100%)	16 Januari 2015 (89,33%)	30 Desember 2015 (100,67%)			89,33%	100,67%		
2	Persentase Realisasi Terhadap Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan				100%	100%	100%	100%	100%	99,62%			102,87%	99,62%		
3	Persentase Realisasi Terhadap Anggaran Belanja yang Telah Ditetapkan				90%	90%	90%	90%	88,19%	83,77%			97,99%	93,08%		

4	Persentase Waktu Penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Sesuai Ketentuan Secara Tepat Waktu				95%	95%	95%	95%	95%	95%			100%	100%		
5	Persentase Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Kepada BPK				31 Maret 2014 (100%)	31 Maret 2015 (100%)	31 Maret 2016 (100%)	31 Maret 2017 (100%)	31 Maret 2014 (100%)	31 Maret 2015 (100%)			100%	100%		
6	Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Keuangan Melalui Sistem				100%	100%	100%	100%	75%	76%			75%	76%		
7	Indeks Kepuasan Masyarakat				75	76	77	78	-	77,74			-	102,29%		
8	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan				100%	100%	100%	100%					100%	100%		

	Tugas															
9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				66	68	70	72	-	-	49,03		-	-	70,04%	
10	Persentase Keberadaan Barang Milik Daerah				85%	87%	90%	92%	85%	87%	90%		100%	100%	100%	
11	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang Telah Disertifikatkan				23%	24%	25%	26%	24,15%	24,51%	25,26 %		105%	102,13%	101,04%	
12	Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Pengelolaan Barang Daerah Melalui Sistem				-	100%	100%	100%	-	100%	100 %		-	100%	100%	

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKBD**

Untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya selama periode empat tahun kedepan banyak aspek yang menjadi penunjang dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKBD. Disamping kondisi internal organisasi berupa sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana, juga faktor eksternal seperti ketersediaan regulasi mempunyai implikasi bagi pengembangan pelayanan BPKBD.

### **2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan BPKBD**

Tantangan merupakan hal-hal yang perlu ditanggulangi dalam pelaksanaan tugas atau pelayanan yang bersumber dari kelemahan (faktor internal) ataupun faktor eksternal. Beberapa tantangan yang teridentifikasi dari uraian sumber daya dan gambaran pelayanan antara lain :

1. Sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan terutama dari segi kualitas.
2. Keterbatasan sumber dana / anggaran untuk dapat melaksanakan urusan/ tugas secara optimal.
3. Tuntutan pengelolaan sumber daya (Keuangan/kepegawaian/sarana prasarana) secara tepat, transparan dan akuntabel.
4. Penyediaan fasilitasi kebijakan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.
5. Penyediaan fasilitasi upaya peningkatan pelayanan publik.
6. Standarisasi Bangunan Gedung Pemerintahan belum sesuai ketentuan.
7. Kelemahan sistem tatalaksana dan koordinasi;
8. Tingkat disiplin dan kesejahteraan aparatur yang masih rendah.
9. Regulasi pusat dan daerah yang tumpang tindih.

### **2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan BPKBD**

Peluang merupakan kesempatan, baik yang konkret maupun abstrak, yang dapat dimanfaatkan dalam saha mencapai tujuan. Beberapa peluang yang teridentifikasi dari uraian sumber daya dan gambaran pelayanan antara lain :

1. Telah selesainya penyelesaian Aset antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pengembangan pola kerjasama untuk pelaksanaan urusan/ tugas.
3. Kebijakan dan fasilitasi pemerintah pusat untuk mendorong proses reformasi birokrasi.
4. Penggunaan teknologi informatika, Kebijakan e-Government/ Cyber City untuk kecepatan, efisiensi pelaksanaan tugas serta keterbukaan informasi.
5. Fasilitasi pemerintah provinsi dan pusat dalam peningkatan kualitas SDM.

**BAB III**  
**ISU – ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah memiliki tugas dan kewajiban membantu Waikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi pelayanannya, BPKBD dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas kelambagaan, antara lain dalam hal indikator kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja yang dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga BPKBD.
2. Kompetensi dan kualitas sumberdaya manusia masih terbatas.
3. Prasarana Gedung yang belum memadai dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif.
4. Budaya organisasi yang belum kondusif, masih perlu ditingkatkan terutama dalam masalah disiplin pegawai, etos kerja, ketekunan, tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja.
5. Koordinasi dan komunikasi antar bidang dan sub bidang di BPKBD belum optimal, hal ini dimungkinkan karena BPKBD merupakan SKPD baru.
6. Perlu diterapkannya pola pembinaan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja.
7. Masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan barang daerah karena belum optimalnya prosedur baku (Standar Operating Procedure).
8. Kebijakan kebijakan atau regulasi regulasi yang cepat berubah.
9. Perkembangan Teknologi Informasi yang perlu terus ditingkatkan dan diikuti oleh peningkatan kualifikasi sumberdaya manusianya.

**3.2. Analisis SWOT**

Analisis SWOT merupakan salah satu alat analisis untuk menentukan strategi yang akan ditempuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi yang hendak dicapai.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKBD secara efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan Internal dan eksternal organisasi.

**3.2.1. Analisis Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal pada dasarnya merupakan kajian atau identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, baik yang menyangkut organisasi, efektivitas organisasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan yang ada. Kondisi lingkungan internal ini dapat menggambarkan kekuatan atau kelemahan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berdasarkan identifikasi maka gambaran kondisi lingkungan internal BPKBD Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) BPKBD sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
- 2) Peran BPKBD sangat vital dan strategis sebagai SKPD yang membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Administrasi Keuangan Daerah
- 3) BPKBD sebagai penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah
- 4) Peran BPKBD sangat strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi keuangan daerah.

b. Kelemahan (Weaknesses)

- 1) Dukungan sarana dan prasarana dan fasilitas kerja belum memadai
- 2) Koordinasi dan komunikasi antar bidang belum optimal
- 3) Belum optimalnya proses pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
- 4) Masih rendahnya kompetensi pelaksana pengelola keuangan daerah dan pengelola barang daerah.

### **3.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal merupakan kajian atau identifikasi terhadap lingkungan utama organisasi yang menyangkut faktor-faktor social, ekonomi, politik maupun teknologi. Kondisi lingkungan eksternal ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang terdiri dari factor-faktor pendorong atau mempermudah dikelompokkan sebagai peluang, sedangkan factor-faktor yang dapat menghambat atau menyulitkan dikelompokkan sebagai ancaman.

Berdasarkan identifikasi maka gambaran permasalahan lingkungan eksternal BPKBD Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah  
Kota Tasikmalaya**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPKBD	
			Internal (Kewenangan BPKBD)	Eksternal (Diluar Kewenangan BPKBD)		
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	
1	Regulasi dan dokumen Penganggaran dan Belanja Daerah	- Tersedianya regulasi tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disesuaikan dengan Undang undang dan Peraturan Pemerintah	- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang N0 33 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 ;	- Konsisten dalam pelaksanaan regulasi tentang tata cara Penyusunan RAPBD, APBD dan APBD Perubahan	- Pelaksanaan penyusunan anggaran rentan terhadap intervensi politik.	- Masih kurangnya dialog dan komunikasi dua arah dalam rangka menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik
		Perda No 13 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013		- Adanya dinamika perubahan regulasi pemerintah pusat	- Kurangnya responsibilitas terhadap perubahan regulasi pemerintah pusat	
2	Pencatatan dan penyelesaian pengelolaan barang daerah	- Tersedianya Regulasi tata cara pencatatan dan pengelolaan aset	- PP No 38 Tahun 2008 Permendagri No 17 tahun 2007	- Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan stakeholders dalam proses pengelolaan barang daerah	Adanya indikasi pengajuan atau gugatan atas aset pemerintah menjadi aset keluarga	
		Telah tercapainya penyelesaian aset dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmlaya	Undang-Undang No 10 Tahun 2001 Pasal 14 Ayat 1 dan 2			

3	Sarana prasarana dan sumberdaya yang belum optimal	- Prasaran dan sarana gedung kantor yang belum memadai dan representatif.		- Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan		
				- Meningkatkan fasilitas pendukung kerja untuk meningkatkan kinerja lembaga		- Ketersediaan fasilitas pendukung kerja dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga masih kurang
		- Perkembangan Teknologi Informasi yang perlu diikuti oleh peningkatan kompetensi SDM di BPKBD		- Meningkatkan dukungan dan kemampuan teknologi informasi untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga		- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga belum optimal
				- Memberi kesempatan yang luas kepada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan		- Proporsi pegawai yang telah mengikuti diklat teknis maupun fungsional masih kurang

#### 4. Peluang (Opportunities)

- 1) Telah selesainya penyelesaian Aset antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi.
- 3) Kebijakan dan fasilitasi pemerintah pusat untuk mendorong proses reformasi birokrasi
- 4) Penggunaan teknologi informatika, Kebijakan e-Government/ Cyber City untuk kecepatan, efisiensi pelaksanaan tugas serta keterbukaan informasi.
- 5) Fasilitasi pemerintah provinsi dan pusat dalam peningkatan kualitas SDM.

#### 5. Ancaman (Threats)

- 1) Perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan Barang daerah yang sangat cepat dan dinamis.
- 2) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan rentan terhadap intervensi politik.
- 3) Masih rendah kompetensi OPD dalam hal pengelolaan keuangan dan barang daerah.
- 4) Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang professional dan bebas KKN.
- 5) Tuntutan pelayanan public yang lebih cepat dan lebih baik.
- 6) Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat.
- 7) Adanya ego sektoral dari OPD.
- 8) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

### 3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah dari Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya terpilih periode 2013-2017 telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya 2005-2025 Tahap II (Perda No. 9 Tahun 2008), yakni **Pemantapan Landasan Pembangunan Kota**. Program prioritas rencana pembangunan yang akan disusun 5 (lima) tahun mendatang akan diarahkan untuk lebih memantapkan hasil-hasil pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat sebagai upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, perumusan visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah dari Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya terpilih ini juga dilandasi oleh komitmen global dalam rangka percepatan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) Tahun 2015 yakni :

- 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan;
- 2) Mencapai pendidikan untuk semua;
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 4) Menurunkan angka kematian anak;
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu;
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup;
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Disamping mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang bersifat *top down* dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, penyusunan visi, misi dan program prioritas daerah ini diharapkan dapat memperhatikan dengan sungguh-sungguh kehendak dari bawah (*bottom up*) dengan mengakomodasi aspirasi dan mengartikulasikan kebutuhan dan keinginan seluruh komponen masyarakat melalui mekanisme survey, dialog interaktif, dengar pendapat, dialog publik, dan media komunikasi sosial lainnya, sehingga melahirkan rumusan visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

#### **VISI**

**"BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA, MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT MADANI"**

#### **Penjelasan Visi**

**Iman** menurut bahasa adalah membenarkan. Menurut istilah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dalam perilaku sehari-hari. **Taqwa** adalah secara sadar menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Secara harfiah taqwa mengandung 3 (tiga) makna yaitu *tawadhu* (sikap rendah hati), *qona'ah* (sikap ikhlas) dan *wara'* (sikap menjaga diri dan hati).

**Kemandirian Ekonomi** adalah kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian yang sebesar mungkin mempergunakan daya/kekuatan sendiri, berdaya saing, semakin terbuka dan tetap terintegrasi dengan perekonomian regional, nasional dan global. Secara operasional kemandirian ekonomi dibangun melalui material (sandang, pangan, papan), intelektual (memiliki pola pikir kritis dan sistematis), dan manajemen komunitas (kemampuan kolektif mengkombinasikan potensi keberdayaan kader/pelaku usaha). Membangun kemandirian bersifat totalitas mencakup banyak aspek, bertahap, fokus berdasar tematik yang disepakati dengan konsistensi pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Daya Saing** adalah segenap kemampuan/daya tarik dalam membentuk atau menawarkan tingkat produktifitas dan bakat/keterampilan masyarakat yang mendorong tumbuhnya investasi dan pergerakan sektor perekonomian dengan kinerja yang berkelanjutan.

**Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing** adalah kemampuan dalam mengembangkan perekonomian daerah, khususnya ekonomi kreatif yang mengutamakan sebesar mungkin sumber daya/kekuatan sendiri dengan tidak membatasi kesempatan dan peluang dari luar melalui mekanisme pasar yang terbuka dan terintegrasi dengan perekonomian regional, nasional dan global.

**Masyarakat Madani** adalah suatu masyarakat yang berbudaya, maju dan modern, setiap warganya menyadari dan mengetahui kewajiban dan haknya terhadap negara, bangsa dan agama serta terhadap sesama dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian, visi "***Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani***" adalah bahwa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan landasan fundamental religius yang menjadi

inspirasi, motivasi, filosofi dan dasar berpijak serta arah dan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan pemerintah dalam mengemban amanah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang mengutamakan sumber daya sendiri tanpa membatasi peluang dari luar, dengan mengembangkan potensi khas daerah untuk sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang berbudaya, maju dan modern dimana setiap warganya menyadari kewajiban dan haknya terhadap negara, bangsa dan agamanya.

## **MISI**

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan menciptakan peningkatan ketaatan dan kesalehan sosial masyarakat;**
- 2. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan;**
- 3. Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengembangan budaya lokal.**

Secara harfiah misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi.

**Misi 1** mengandung 2 (dua) aspek yang dituju, yakni penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem pemerintahan (kelembagaan, SDM/aparatur dan regulasi/mekanisme) dan kehidupan masyarakat dalam sistem sosial yang kompleks. Misi 1 mempunyai pengertian segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat serta menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain sikap masyarakat yang penuh kesadaran untuk mematuhi hukum dan mendukung kebijakan pemerintah serta menjunjung tinggi tata nilai religius dengan memelihara budaya gotong royong, solidaritas dan kesetiakawanan sosial serta kerukunan antar sesama komponen masyarakat, dengan tujuan dan sasarannya :

- Tujuan 1 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel;**
- Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi;
- Sasaran 2 : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien;
- Sasaran 3 : Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan;
- Sasaran 4 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
- Sasaran 5 : Meningkatnya pelayanan publik;
- Sasaran 6 : Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat;
- Sasaran 7 : Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

dengan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat.

**Tujuan 2 : Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, teratur, disiplin dan religius.**

Sasaran 1 : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Sasaran 2 : Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Misi 2** mengandung makna upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya (sufrastruktur) yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup, dengan tujuan dan sasarannya :

**Tujuan 1 : Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;**

Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan;

Sasaran 2 : Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya penyediaan air baku;

Sasaran 3 : Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang memadai serta tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

**Tujuan 2 : Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berdasarkan pola tata ruang daerah;**

Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan;

Sasaran 2 : Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib dan sehat sesuai dengan pola tata ruang;

Sasaran 3 : Pengendalian sumber daya alam (SDA), lingkungan dan penyediaan energi.

**Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan daya beli masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi lokal.**

Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat;

Sasaran 2 : Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya;

Sasaran 3 : Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

**Misi 3** mengandung makna upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan budaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia

(SDM) yang cerdas, handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya lokal, dengan tujuan dan sasarannya :

**Tujuan 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;**

Sasaran 1 : Tercapainya pendidikan dasar untuk semua;

Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

**Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.**

Sasaran 1 : Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran;

Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

Sasaran 3 : Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;

Sasaran 4 : Menjamin perlindungan anak dan perempuan;

Sasaran 5 : Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan;

Sasaran 6 : Pelestarian seni budaya dan olah raga.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dan untuk menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas pembangunan, Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah merumuskan kebijakan program prioritas pembangunan pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 sebagai berikut:

1. Pelestarian tata nilai dan kebudayaan daerah;
2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan amanah;
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat;
6. Peningkatan kualitas SDM yang didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
7. Pengendalian tata ruang, permukiman dan lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan efisiensi, efektivitas program serta pencapaian target kinerja pembangunan, maka dirumuskan suatu kebijakan umum pembangunan tahunan secara bertahap. Perumusan pembangunan tahunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis, prioritas pembangunan dan berdasarkan kemendesakan kebutuhan serta limitasi kemampuan keuangan daerah. Dengan pentahapan ini diharapkan *output* dan *outcome* pembangunan secara cepat dan nyata dapat dirasakan oleh kelompok sasaran pembangunan khususnya, serta seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya pada umumnya.

Mekanisme pentahapan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut "**Fokus Pembangunan Kota Tasikmalaya**" yang merupakan sasaran utama pembangunan pada tahun perencanaan dengan tidak mengabaikan urusan dan sasaran pembangunan lainnya.

### **Fokus Pembangunan Tahun 2013-2015 : "Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah"**

Fokus pembangunan periode ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur sebagai modal dasar untuk pelaksanaan pada Fokus Pembangunan Tahun 2016-2017. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah adalah upaya untuk menyediakan infrastruktur daerah yang mempunyai daya tampung sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar sesuai dengan kelas dan fungsinya. Pembangunan infrastruktur daerah meliputi infrastruktur pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta kemasyarakatan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Pada tahap awal, prioritas pembangunan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase terutama yang menuju pada pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, menggambarkan kondisi jaringan jalan yang memenuhi standar konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsinya. Tahap selanjutnya pembangunan difokuskan pada pengembangan infrastruktur lainnya, antara lain :

- a. Infrastruktur perekonomian, seperti pemeliharaan irigasi, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, pembangunan sentra usaha mikro dan kecil, industri kreatif dengan konsep *One Village One Product*, serta terminal peti kemas;
- b. Infrastruktur pemerintahan, seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor pemerintahan;
- c. Infrastruktur kesehatan, seperti pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu dan pengembangan RSUD, serta penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan;
- d. Infrastruktur kemasyarakatan, seperti penyediaan taman kota, pembangunan dan rehabilitasi sarana olah raga, gedung kesenian dan keagamaan.

### **Fokus Pembangunan Tahun 2016-2017 : "Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial"**

Fokus pembangunan pada periode ini merupakan lanjutan dari Fokus Pembangunan sebelumnya. Pada periode ini pembangunan diprioritaskan pada upaya mendorong kemandirian ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai oleh meningkatnya daya beli dan kualitas hidup masyarakat.

Upaya peningkatan daya beli masyarakat diantaranya melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan produktivitas usaha, pengendalian inflasi, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Sedangkan langkah utama yang menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat diantaranya dengan meningkatkan mutu layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berdampak langsung pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kota Tasikmalaya yang sehat, produktif, mandiri dan berdaya saing.

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan barang daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor Tahun 2013, BPKBD mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi keuangan daerah. Hal ini berimplikasi terhadap BPKBD untuk berperan aktif dan akomodatif terhadap pencapaian visi, misi dan kebijakan program prioritas pembangunan daerah yang telah dirumuskan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih selaku Kepala daerah dengan mengoptimalkan segala kekuatan dan peluang yang ada, serta meminimalkan dampak dari ancaman dan kelemahan sistem baik yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan organisasi.

#### **3.4. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan dan kekayaan Negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Kementerian Keuangan harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010 – 2014, dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dai Presiden/Pemerintah.

Untuk itu disusun visi dan misi Kementerian Keuangan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung yaitu **“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad 21 “**, serta dengan Misi sebagai berikut :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang taat;
2. Menerapkan kebijakan fiscal yang prudent;
3. Megelola Neraca Keuangan pusat dengan resiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan di distribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Berdasar hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia, BPKBD perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan bagi BPKBD Kota Tasikmalaya yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, faktor – faktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>VISI : "BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA, MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT MADANI"</b>				
<b>No.</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan BPKBD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	<b>Misi 1 :</b> <i>Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan menciptakan peningkatan ketaatan dan kesalehan sosial masyarakat</i>	- Belum optimalnya peran organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi keuangan daerah	- Pelaksanaan penyusunan anggaran rentan terhadap intervensi politik  - Sarana prasarana dan sumberdaya yang belum optimal	- Tersedianya regulasi tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disesuaikan dengan Undang undang dan Peraturan Pemerintah  -
2.	<b>Misi 2 :</b> <i>Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan</i>	-	-	-
3.	<b>Misi 3 :</b>			

<i>Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengembangan budaya lokal</i>	-	-	-
--	---	---	---

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya adalah arahan kebijakandan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Setelah melakukan penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS Kota Tasikmalaya, permasalahan pelayanan, penghambat dan pendorong keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKBD Kota Tasikmalaya disajikan dalam Tabel 3.3. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah, Tabel 3.4. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah, Tabel 3.5. Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS sebagai berikut :

**Tabel. 3.3.**  
**Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah**  
**BPKBD Kota Tasikmalaya**

( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )
	<b>Kawasan Lindung</b>				
	<i>Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya</i>				
1	Kawasan Resapan Air	Fungsi Campuran	Penetapan perlindungan kawasan sempadan mata air	Tidak berpengaruh	
	<i>Kawasan perlindungan setempat</i>				
1	Sempadan Sungai	Fungsi Campuran	Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan sungai	Tidak berpengaruh	

2	Kawasan Sekitar Situ	Fungsi Campuran	Penetapan perlindungan kawasan sempadan danau	Tidak berpengaruh	
	<i>Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya</i>	Fungsi Campuran	Pengembangan Kawasan Cagar Budaya	Tidak berpengaruh	
	<i>Kawasan lindung geologi</i>	Fungsi Campuran	Penetapan kawasan lindung geologi	Penyusunan Rencana Pemanfaatan Kawasan lindung geologi	kawasan sekitar mata air Cibunigeulis di Kecamatan Bungursari, kawasan sekitar mata air Cibangbay di Kecamatan Tamansari; dan kawasan sekitar mata air Cikunten II di Kecamatan Mangkubumi
	<i>Kawasan rawan bencana alam</i>	Fungsi Campuran			

1	Kawasan Bencana Alam Geologi Aliran Lahar	Fungsi Campuran	Penetapan perlindungan kawasan bencana alam geologi aliran lahar	Penyusunan Rencana pemanfaatan kawasan bencana alam geologi aliran lahar	bantaran Sungai Ciloseh di Kelurahan Sukarindik, Kelurahan Bungursari, Kelurahan Sukamajukidul, dan Kelurahan Parakannyasag, bantaran Sungai Ciromban di Kelurahan Cibunigeulis, Kelurahan Bantarsari, dan Kelurahan Sukamulya, bantaran Sungai Cikunir di Kelurahan Cipari, bantaran Sungai Ciwulan di Kelurahan Cibeuti.
2	Kawasan Rawan Gerakan Tanah Menengah	Fungsi Campuran	Penetapan perlindungan kawasan rawan gerakan tanah menengah	Penyusunan rencana pemanfaatan kawasan rawan gerakan tanah menengah	Sebagian Kecamatan Kawalu di sekitar bantaran sungai Ciwulan, Sebagian Kecamatan Purbaratu di sekitar bantaran sungai Citanduy, Sebagian Kecamatan Tamansari di sekitar bantaran sungai Cikembang.
	<i>Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>				

1	RTH Publik	Fungsi Campuran	Pengembangan RTH Taman	Tidak berpengaruh	
2	RHT Private	Fungsi Campuran	Pengembangan RTH Pekarangan	Tidak berpengaruh	
	<b>Kawasan Budidaya</b>				
	<i>kawasan peruntukan perumahan</i>				
1	perumahan berkepadatan tinggi	Fungsi Campuran	Pengembangan kawasan permukiman berkepadatan tinggi	penyusunan regulasi pengembangan kawasan permukiman dan perumahan	Tersebar diseluruh wilayah di Kota Tasikmalaya
2	perumahan berkepadatan sedang	Fungsi Campuran	Pengembangan kawasan permukiman berkepadatan sedang	penyusunan regulasi pengembangan kawasan	Tersebar diseluruh wilayah di Kota Tasikmalaya

				permukiman dan perumahan	
3	perumahan berkepadatan rendah	Fungsi Campuran	Pengembangan kawasan permukiman berkepadatan rendah	penyusunan regulasi pengembangan kawasan permukiman dan perumahan	Tersebar diseluruh wilayah di Kota Tasikmalaya
	<i>kawasan peruntukan perdagangan dan jasa</i>				
1	koridor perdagangan dan jasa	Fungsi Campuran	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala SWK	penyusunan regulasi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Tersebar diseluruh wilayah di Kota Tasikmalaya
2	pusat perbelanjaan dan toko modern	Fungsi Campuran	Pengembangan Kawasan Perdagangan	penyusunan regulasi	Tersebar diseluruh wilayah di Kota Tasikmalaya

			dan jasa skala Kecamatan	pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	
3	pasar tradisional	Fungsi Campuran	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala SWK	penyusunan regulasi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Tersebar diseluruh wilayah di Kota Tasikmalaya
	<i>kawasan peruntukan perkantoran</i>	Fungsi Campuran		penyusunan regulasi pengembangan kawasan perkantoran	kawasan perkantoran pemerintah diarahkan di koridor Jalan Letnan Harun, Jalan Siliwangi, Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Noenoeng Tisnasaputra
	<i>kawasan peruntukan industri dan pergudangan</i>				

1	kawasan industri besar dan pergudangan	Fungsi Campuran	Penataan kawasan peruntukan industri dan pergudangan	Tidak berpengaruh	
2	industri kecil/mikro	Fungsi Campuran		Tidak berpengaruh	
	<i>kawasan peruntukan pariwisata</i>				
1	pariwisata buatan	Fungsi Campuran	Pengembangan wisata kuliner	Tidak berpengaruh	
2	pariwisata alam	Fungsi Campuran	Pengembangan wisata alam	Tidak berpengaruh	
3	pariwisata budaya	Fungsi Campuran	Pengembangan wisata budaya	Tidak berpengaruh	
	<i>kawasan peruntukan kegiatan sektor informal</i>		Penyediaan Ruang Peruntukan Sektor Informal	Perencanaan Ruang Sektor Informal	sekitar Pasar Cikurubuk di Kecamatan Mangkubumi
	<i>kawasan peruntukan pertanian</i>				

1	kawasan pertanian tanaman pangan	Fungsi Campuran	Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan	Tidak berpengaruh	
2	kawasan pertanian hortikultura	Fungsi Campuran	Pengembangan kawasan pertanian hortikultura	Tidak berpengaruh	
3	kawasan perkebunan	Fungsi Campuran	Pengembangan kawasan perkebunan	Tidak berpengaruh	
4	kawasan peternakan	Fungsi Campuran	Pengembangan Kawasan Peternakan	Tidak berpengaruh	
	<i>kawasan peruntukan perikanan</i>				
1	kawasan minapolitan	Fungsi Campuran	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Tidak berpengaruh	
2	kawasan budidaya perikanan lain	Fungsi Campuran	Pengembangan Kawasan Perikanan lain	Tidak berpengaruh	
	<i>kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat</i>				

1	kawasan hutan produksi tetap	Fungsi Campuran	Pengembangan Hutan Produksi	Tidak berpengaruh	
2	kawasan hutan rakyat	Fungsi Campuran		Tidak berpengaruh	
	<i>kawasan peruntukan pertambangan</i>	Fungsi Campuran	Penetapan kawasan pertambangan	Tidak berpengaruh	
	<i>kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara</i>				
1	Pangkalan Udara Wiriadinata	Fungsi Pertahanan dan Keamanan		Tidak berpengaruh	
2	Markas Brigade Infanteri 13/Galuh	Fungsi Pertahanan dan Keamanan		Tidak berpengaruh	
3	kawasan pertahanan dan keamanan lainnya	Fungsi Pertahanan dan Keamanan		Tidak berpengaruh	

	<i>kawasan peruntukan pelayanan umum</i>				
1	kawasan terpadu pendidikan tinggi	Fungsi Campuran	Pengembangan kawasan pendidikan	Perencanaan Kawasan terpadu pendidikan tinggi	Kecamatan Tamansari
2	kawasan peruntukan pelayanan kesehatan	Fungsi Campuran	Pengembangan kawasan kesehatan	Tidak berpengaruh	
3	kawasan peruntukan peribadatan	Fungsi Campuran	Pengembangan Sarana Peribadatan	Tidak berpengaruh	
	<i>ruang evakuasi bencana</i>		Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana	Tidak berpengaruh	

**Tabel 3.4.**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah**  
**Kota Tasikmalaya**

<b>No</b>	<b>Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Struktur Ruang Saat ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD</b>	<b>Pelayanan SKPD Arahkan Lokasi Pengembangan</b>
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )
	<b>Rencana sistem pusat pelayanan</b>				
1	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Pusat Pelayanan Kota	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Penyusunan Rencana Pengembangan PPK	Kota Tasikmalaya
2	Subpusat Pelayanan Kota (SPK)	Sebagian Besar Merupakan Sub Pelayanan Kota	Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPK)	Penyusunan Rencana Pengembangan SPK	Kota Tasikmalaya
3	Pusat Lingkungan (PL)	Sebagian Besar Merupakan Pusat Lingkungan	Pengembangan Pusat Lingkungan (PL)	Penyusunan Rencana Pengembangan PL	Kota Tasikmalaya

	<b>Rencana sistem jaringan prasarana</b>				
	<i>rencana sistem jaringan prasarana utama</i>				
	rencana sistem jaringan transportasi darat				
1	rencana sistem jaringan transportasi jalan	Sebagian besar sudah membentuk jaringan transportasi jalan	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Kota	Tidak Berpengaruh	
2	rencana sistem jaringan transportasi kereta api	jaringan transportasi kereta api	Pengembangan Sistem Transportasi Kereta Api Barang	Tidak Berpengaruh	
3	rencana sistem jaringan transportasi udara	lapangan udara non komersial	Pengembangan Fasilitas Pangkalan Udara	Tidak Berpengaruh	
	<i>rencana sistem jaringan prasarana lainnya</i>				

1	sistem jaringan telekomunikasi				
	jaringan kabel	jaringan kabel		Tidak Berpengaruh	
	jaringan nirkabel	jaringan nirkabel	Pengembangan Sistem Jaringan telekomunikasi	Tidak Berpengaruh	
2	sistem jaringan sumberdaya air				
	Wilayah Sungai dan DAS	belum termanfaatkan		Tidak Berpengaruh	
	Cekungan Air Tanah	sebagian sudah dimanfaatkan		Tidak Berpengaruh	
	jaringan irigasi	jaringan irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya	Tidak Berpengaruh	
	prasarana air baku untuk air bersih	sebagian sudah dilayani oleh PDAM		Tidak Berpengaruh	
3	sistem pengendalian banjir	sebagian sudah tersedia	Pengembangan Sistem Pengendali Banjir	Tidak Berpengaruh	
	<i>sistem jaringan energi</i>				
1	jaringan pipa minyak dan gas bumi	Jaringan Perpipaan Pertamina			
2	gardu induk distribusi tenaga listrik	Gardu Induk	Pengembangan Sistem Jaringan listrik	Tidak Berpengaruh	

3	jaringan transmisi tenaga listrik	Jaringan Listrik SUTT dan SUTR		Tidak Berpengaruh	
	<i>sistem jaringan prasarana infrastruktur perkotaan</i>				
1	sistem drainase	sebagian sudah terbuat saluran drainase	Pengembangan Sistem Drainase	Tidak Berpengaruh	
2	sistem pengelolaan sampah	3R, Komposting, TPS dan TPA	Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Tidak Berpengaruh	
3	sistem penyediaan air minum	PDAM	Pengembangan pelayanan air minum	Tidak Berpengaruh	
4	sistem pengelolaan air limbah	Sebagian melalui Offsite dan Onsite	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah	Tidak Berpengaruh	

**Tabel.3.5.**  
**Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS**  
**Kota Tasikmalaya**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Daerah**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Beberapa program dan kegiatan masih memungkinkan baik dari kapasitas daya dukung maupun daya tampung lingkungan hidup, namun ada beberapa program dan kegiatan yang daya dukung dan daya tampungnya kurang memungkinkan.	Tidak berpengaruh	-
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Beberapa program dan kegiatan memiliki katagori berpengaruh "kuat", "cukup", "longgar" dan "sangat longgar" terhadap lingkungan	Tidak berpengaruh	-
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Beberapa program dan kegiatan memiliki kinerja layanan/jasa ekosistem "rendah", "cukup" dan "tinggi"	Tidak berpengaruh	-
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Beberapa program dan kegiatan memiliki tingkat efisiensi yang "rendah", "cukup" dan "tinggi" terhadap pemanfaatan sumber daya alam	Tidak berpengaruh	-

5	Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Beberapa program dan kegiatan memiliki tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi yang "rendah", "cukup" dan "tinggi" terhadap perubahan iklim	Tidak berpengaruh	-
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Beberapa program dan kegiatan memiliki tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati adaptasi yang "rendah", "cukup" dan "tinggi"	Tidak berpengaruh	-

### 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan actual yang menjelaskan keterkaitan antara organisasi dengan lingkungannya baik secara internal maupun eksternal dan banyak mempengaruhi kualitas kinerja suatu organisasi. Kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi / hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks seperti diuraikan diatas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dulu isu global, nasional, regional, dan local sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6. Identifikasi Isu-Isu Strategis**

<b>Dinamika Global</b>	<b>Dinamika Nasional</b>	<b>Dinamika Regional (Jawa Barat)</b>	<b>Lokal (Kota Tasikmalaya)</b>
Tujuan Pembangunan Millenium/ <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs) : 1. Membetantas kemiskinan dan	Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;	Tujuan Inti Pembangunan Jawa Barat ( <i>Common Goals</i> ) dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat : 1. Peningkatan kualitas Pendidikan 2. Peningkatan	Isu Strategis dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 adalah : 1. Infrastruktur Daerah 2. Kualitas Sumber Daya Manusia

kelaparan	2. Pendidikan	Kualitas Kesehatan	(Pendidikan dan Kesehatan)
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua	3. Kesehatan	3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat	3. Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan
3. Mendorong kesejahteraan jender dan pemberdayaan perempuan	4. Penanggulangan Kemiskinan	4. Kemandirian Pangan	4. Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat
4. Menurunkan angka kematian anak	5. Ketahanan Pangan	5. Peningkatan Kinerja Apatur	5. Tata Kelola Pemerintahan
5. Meningkatkan kesehatan ibu	6. Infrastruktur	6. Pengembangan Infrastruktur Wilayah	6. Penanggulangan Kemiskinan
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya	7. Iklim investasi dan usaha	7. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku	7. Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah
	8. Energi	8. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup	
	9. Lingkungan Hidup dan Bencana	9. Pembangunan Perdesaan	
	10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik	10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata	
	11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi		

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi di tingkat global, nasional, regional dan lokal dan juga berdasarkan hasil analisis secara internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi isu -isu strategis BPKBD yang menjadi pedoman dan perumusan visi, misi, sasaran dan tujuan BPKBD, yaitu :

1. Penguatan Kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah;
2. Penyediaan data keuangan dan barang daerah yang terintegrasi untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
3. Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SIPKD yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Pembentukan Organisasi Perangkat daerah ini merupakan penggabungan antara Bagian Keuangan dan Bagian Aset Daerah dilingkungan Sekretariat daerah Kota Tasikmalaya. Sesuai tugas pokok dan fungsinya membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi keuangan daerah maka BPKBD mempunyai tanggung jawab besar bagi keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam RPJP dan RPJMD. Untuk mencapai tujuan tersebut maka BPKBD memandang perlu menyusun perumusan Rencana Strategis BPKBD untuk periode 2014 – 2017. Perencanaan strategis tersebut merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun oleh BPKBD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut, BPKBD merumuskan visi sebagai komponen yang penting dari perencanaan strategis yang merupakan gambaran masa depan yang diinginkan oleh BPKBD. Adapun visi BPKBD adalah :

**“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH YANG AKUNTABEL DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH”**

Visi tersebut berdasarkan urusan wajib BPKBD sebagai pengelola keuangan sebagaimana di atur dalam PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemandagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Pemandagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengertian keuangan negara dalam undang-undang no 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan hak milik negara ( pasa 1 angka 1). Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Bab 1 Pasal 1 Ayat 5), sedangkan pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah ( Bab 1 Ayat 1 Pasal 6).

Kata **Akuntabel** bermakna adalah instrument yang menunjukkan apakah prinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan dan kesamaan di hadapan hukum telah dihargai atau tidak. Akuntabel adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas dari administrasi public. Sifat akuntabel tidak abstrak tapi konkret dan harus ditentukan melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabel berkaitan dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh pegawai sipil dan otoritas publik.

Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dalam rangka mendukung lancarnya penyelenggaraan roda pemerintahan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya .

Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik . Dengan pernyataan Misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

**Untuk merealisasikan Visi BPKBD maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :**

**1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel**

**2. Mewujudkan Tata Kelola Barang Daerah yang Akuntabel**

Untuk dapat merealisasikan visi dan misi diatas, sesuai karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya yang harus dikembangkan, adalah :

1. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung-jawab.
2. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan.
3. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga amanah.

Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan segenap aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan visi dan misi BPKBD dapat tercapai.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi menunjukkan kondisi yang ingin dicapai serta berdasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dengan berpedoman kepada visi dan misi BPKBD yang telah disusun maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKBD adalah sebagaimana Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Akuntabel dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel								
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Per Tahun			
					2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	1 Persentase Waktu Penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya yang Tepat Waktu	31 Desember 2014 (100%)	31 Desember 2015 (100%)	31 Desember 2016 (100%)	31 Desember 2017 (100%)
				2 Persentase Realisasi Terhadap Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan	100%	100%	100%	100%
				3 Persentase Realisasi Terhadap Anggaran Belanja yang Telah Ditetapkan	90%	90%	90%	90%
				4 Persentase Waktu Penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Sesuai Ketentuan Secara Tepat Waktu	95%	95%	95%	95%

				5 Persentase Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Kepada BPK	31 Maret 2014 (100%)	31 Maret 2015 (100%)	31 Maret 2016 (100%)	31 Maret 2017 (100%)
				6 Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Keuangan Melalui Sistem	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Pelayanan Publik	7 Indeks Kepuasan Masyarakat	75	76	77	78
				8 Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	9 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	66	68	70	72

**Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Barang Daerah yang Akuntabel**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Per Tahun			
					2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	Meningkatnya Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien	1 Persentase Keberadaan Barang Milik Daerah	85%	87%	90%	92%
				2 Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang Telah Disertifikatkan	23%	24%	25%	26%
				3 Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Pengelolaan Barang Daerah Melalui Sistem	-	100%	100%	100%

### **4.3. Strategi dan Kebijakan**

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Segala sesuatu yang secara langsung di maksudkan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD di anggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan di capai ,di perjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarah pada rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mecapai tujuan dan sasaran selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan visi dan misi dapat di lihat dalam Tabel 4.2. sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

**Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Akuntabel dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	1 Persentase Waktu Penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya yang Tepat Waktu	Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Merumuskan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
					2 Persentase Realisasi Terhadap Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan		Penggunaan Teknologi Informasi bagi Pelayanan Publik
					3 Persentase Realisasi Terhadap Anggaran Belanja yang Telah Ditetapkan		Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Keuangan
					4 Persentase Waktu Penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Sesuai Ketentuan Secara Tepat Waktu		Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi
					5 Persentase Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Kepada BPK		Ketepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan

					6 Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Keuangan Melalui Sistem		
				Meningkatnya Pelayanan Publik	7 Indeks Kepuasan Masyarakat 8 Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mudah, Cepat dan Transparan	Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	9 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan Kinerja dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Manajemen Kinerja yang Andal dan Akuntabel
2	Mewujudkan Tata Kelola Barang Daerah yang Akuntabel	Peningkatan Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	Meningkatnya Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien	1 Persentase Keberadaan Barang Milik Daerah 2 Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang Telah Disertifikatkan 3 Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Pengelolaan Barang Daerah Melalui Sistem	Penatausahaan Barang Daerah sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Merumuskan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Pengamanan Aset Daerah Penatausahaan Barang Daerah Berbasis Teknologi Informasi

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN**  
**PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya, maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan rencana pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode 2014 - 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1 berikut :

**Tabel 5.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah**

Koding	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
				2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1.20.1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran			100%	1.320.004.500	100%	1.062.445.900	100%	1.338.481.500	100%	1.311.464.000	100%	5.032.395.900		
1.20.1.20.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai Rp. 3.000 Tersedianya Materai Rp. 6.000			270 Buah Materai Rp. 3.000 dan 365 Buah Materai Rp. 6.000	3.000.000	270 Buah Materai Rp. 3.000 dan 365 Buah Materai Rp. 6.000	3.000.000	270 Buah Materai Rp. 3.000 dan 365 Buah Materai Rp. 6.000	3.000.000	270 Buah Materai Rp. 3.000 dan 365 Buah Materai Rp. 6.000	3.000.000	1.080 Buah Materai Rp. 3.000 dan 1460 Buah Materai Rp. 6.000	12.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH	
1.20.1.20.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya	Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Jasa Layanan			1 Tahun	420.000.000	1 Tahun	463.000.000	1 Tahun	558.000.000	1 Tahun	568.000.000	4 Tahun	2.009.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN	

	Air dan Listrik	Internet														DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			-	8 Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) dan 1 Unit Gedung Kantor	65.120.000	8 Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) dan 1 Unit Gedung Kantor	15.120.000	8 Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) dan 1 Unit Gedung Kantor	48.880.000	8 Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) dan 1 Unit Gedung Kantor	60.000.000	32 Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) dan 1 Unit Gedung Kantor	189.120.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4 Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2			-	19 Unit	10.320.000	19 Unit	10.500.000	19 Unit	10.500.000	19 Unit	15.000.000	76 Unit	46.320.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Bangunan			-	-	19 Item dan 1 Lokasi	5.000.000	19 Item dan 1 Lokasi	84.530.500	19 Item dan 1 Lokasi	85.000.000	57 Item dan 1 Lokasi	174.530.500	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH	
1.20.1.20.0 5.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			-	38 Jenis	27 Jenis	147.095.050	27 Jenis	85.000.000	27 Jenis	85.000.000	62.160.000	119 Jenis	379.255.050	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan			-	57 Barang Cetakan, 51.722 Lembar Penggandaan dan 100 Buku Penjilidan	23 Barang Cetakan, 50.140 Lembar Penggandaan dan 100 Buku Penjilidan	75.000.000	16 Barang Cetakan, 20.000 Lembar Penggandaan dan 70 Buku Penjilidan	66.262.000	13 Barang Cetakan, 18.130 Lembar Penggandaan dan 100 Buku Penjilidan	70.000.000	109 Barang Cetakan, 139.992 Lembar Penggandaan dan 370 Buku Penjilidan	286.262.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH	

1.20.1.20.0 5.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor			-	52 Jenis	45.000.000	52 Jenis	3.906.900	12 Jenis	3.906.000	52 Jenis	5.500.000	168 Jenis	58.312.900	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	5 Jenis	1.560.450	10 Jenis	5.700.000	10 Jenis	5.700.000	10 Jenis	37.840.000	35 Jenis	50.800.450	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			-	18 Jenis	15.309.000	14 Jenis	27.894.000	17 Jenis	31.749.000	18 Jenis	15.000.000	67 Jenis	89.952.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			-	1 Tahun	15.000.000	4 Tahun	60.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH						

1.20.1.20.0 5.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum Harian, Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman Rapat, Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman Tamu			-	1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	45.325.000	1 Tahun	73.590.000	1 Tahun	50.000.000	4 Tahun	243.915.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			-	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	262.500.000	1 Tahun	262.500.000	1 Tahun	200.000.000	4 Tahun	1.025.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.01.21	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Terlaksananya Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan			-		-		-	1 Tahun	40.364.000	1 Tahun	119.964.000	2 Tahun	160.328.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.01.22	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Jasa Pelayanan Pegawai			-	1 Tahun	147.600.000	1 Tahun	45.500.000	1 Tahun	49.500.000	1 Tahun	5.000.000	4 Tahun	247.600.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
<b>1.20.1.20. 05.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			-	<b>100%</b>	<b>1.834.645.500</b>	<b>100%</b>	<b>1.272.221.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.975.861.000</b>	<b>100%</b>	<b>621.847.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.704.574.500</b>	
1.20.1.20.0 5.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan			-	1 Unit	255.000.000	2 Unit	400.000.000	3 Unit	940.000.000		-	6 Unit	1.595.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor			-	9 Paket Pekerjaan	529.500.000	1 Paket Pekerjaan	11.600.000	4 Paket Pekerjaa n	158.840.000	3 Unit Barang	200.000.000	3 Unit Barang dan 14 Paket Pekerjaan	899.940.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor			-	-	1 Paket	4.700.000	3 Paket	37.990.000	1 Paket	40.000.000	5 Paket	82.690.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.02.10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair			-	142 Unit Meubelair	39 Unit Meubelair	37.600.000	169 Unit Meubelair	186.650.000	12 Unit Meubelair	20.000.000	362 Unit Meubelair	362.450.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			-	3 Paket		75.000.000	-	-		-	3 Paket	75.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Service - Terlaksananya Penyediaan Penggantian Suku Cadang - Terlaksananya Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas & Pelumas			-	6 Unit	113.400.000	6 Unit	173.045.000	6 Unit	173.405.000	6 Unit	80.000.000	24 Unit	539.850.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	-Tersedianya Penyediaan Jasa Service -Terlaksananya Penyediaan Penggantian suku cadang -Terlaksananya Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas			-	1 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor	100.000.000	2 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor	118.476.000	2 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor	118.476.000	2 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor	81.847.000	7 Unit Mobil dan 44 Unit Sepeda Motor	418.799.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			-	20 Jenis Perlengkapan	4.600.000	5 Jenis Perlengkapan	2.900.000	1 Jenis Perlengkapan	2.900.000	3 Jenis Perlengkapan	10.000.000	29 Jenis Perlengkapan	20.400.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.02.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair			-	1 Jenis Meubelair	10.980.000	7 Jenis Meubelair	1.000.000	1 Jenis Meubelair	4.000.000	1 Jenis Meubelair	10.000.000	10 Jenis Meubelair	25.980.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.02.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor			-	9 Unit	43.000.000	59 Unit	45.000.000	38 Unit	91.750.000	47 Unit	40.000.000	153 Unit	219.750.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.02.45	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Terlaksananya Stand BPKBD pada Kegiatan Tasik Fair dan Event-event Lainnya			-	2 Kegiatan	18.500.000	2 Kegiatan	31.500.000	4 Kegiatan	67.500.000	2 Kegiatan	45.000.000	10 Kegiatan	162.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.02.48	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	9 Jenis	566.465.500	11 Jenis	446.400.000	27 Jenis	1.194.350.000	16 Jenis	95.000.000	63 Jenis	2.302.215.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
<b>1.20.1.20.05.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tersedianya Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu</b>			-	<b>100%</b>	<b>34.750.000</b>	<b>100%</b>	<b>38.025.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.150.000</b>	<b>100%</b>	<b>22.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>114.925.000</b>	
1.20.1.20.0 5.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari Tertentu			-	83 Stel Pakaian	34.750.000	60 Stel Pakaian	38.025.000	63 Stel Pakaian	20.150.000	62 Stel Pakaian	22.000.000	268 Stel Pakaian	114.925.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
<b>1.20.1.20.05.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah Aparatur/ Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat/ Bimtek</b>			-	<b>10%</b>	<b>32.000.000</b>	<b>10%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10%</b>	<b>224.920.000</b>	<b>10%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>40%</b>	<b>296.920.000</b>	

1.20.1.20.0 5.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis			-	1 Tahun	32.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	224.920.000	1 Tahun	20.000.000	4 Tahun	296.920.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
<b>1.20.1.20.05.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tersedianya Laporan Keuangan Yang Akuntabel</b>			-	<b>2 Dokumen</b>	<b>65.000.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>42.000.000</b>	<b>17 Dokumen</b>	<b>357.000.000</b>	
1.20.1.20.0 5.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			-			1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	85.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran			-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	8.000.000	4 Dokumen	108.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG

																DAERAH
1.20.1.20.0 5.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran			-	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	8.000.000	4 Dokumen	113.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.06.06	Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran	Tersedianya Laporan Barang Semesteran			-			1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.500.000	3 Dokumen	25.500.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.06.07	Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Barang Akhir Tahun			-			1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.500.000	3 Dokumen	25.500.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
<b>1.20.1.20. 05.13</b>	<b>Program Perencanaan Kerja</b>	<b>Tersusunnya Rencana Kerja BPKBD</b>			-	<b>2 Dokumen</b>	<b>33.000.000</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>20.000.000</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>93.000.000</b>	

1.20.1.20.0 5.13.01	Penyusunan Rencana Kerja	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja			-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	55.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.13.02	Penyusunan Rencana Strategis	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis			-	1 Dokumen	18.000.000		-		-	1 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	28.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.13.04	Revisi Rencana Strategis	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Hasil Revisi			-		-	1 Dokumen	10.000.000		-		-	1 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.05.17	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib dan</b>			-	100%	6.442.116.000	100%	7.197.551.200	100%	8.183.426.750	100%	3.801.715.200	100%	25.624.809.150	

		Akuntabel														
1.20.1.20.0 5.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersedianya Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			-	1 Peraturan Daerah	300.000.000	1 Peraturan Daerah	300.000.000	1 Peraturan Daerah	331.000.000	1 Peraturan Daerah	166.744.800	4 Peraturan Daerah	1.097.744.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD			-	1 Peraturan Walikota	100.000.000	1 Peraturan Walikota	100.000.000	1 Peraturan Walikota	150.000.000	1 Peraturan Walikota	82.819.800	4 Peraturan Walikota	432.819.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersedianya Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			-	1 Peraturan Daerah	300.000.000	1 Peraturan Daerah	300.000.000	1 Peraturan Daerah	331.000.000	1 Peraturan Daerah	166.744.800	4 Peraturan Daerah	1.097.744.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran			-	1 Peraturan Walikota	100.000.000	1 Peraturan Walikota	100.000.000	1 Peraturan Walikota	150.000.000	1 Peraturan Walikota	82.819.800	4 Peraturan Walikota	432.819.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

	Perubahan APBD	Perubahan APBD														BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			-	1 Peraturan Daerah	300.000.000	1 Peraturan Daerah	300.000.000	1 Peraturan Daerah	300.000.000	1 Peraturan Daerah	200.000.000	4 Peraturan Daerah	1.100.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.100	Perhitungan dan Penyesuaian Pajak Penghasilan atas Gaji PNSD sesuai PMK Nomor 122/PMK.010/2015	Terfasilitasinya Perhitungan dan Penyesuaian Pajak Penghasilan Atas Gaji PNSD Sesuai PMK No. 122/PMK.010/2015			-		-		-	1 Tahun	75.000.000		-	1 Tahun	75.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.101	Pengelolaan Data Anggaran	Tersedianya Dokumen Data Anggaran Pemerintah Kota			-		-		-	3 Dokumen	209.000.000	-	-	3 Dokumen	209.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

		Tasikmalaya														BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.104	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah			-		-		-		-	1 Tahun	153.000.000	1 Tahun	153.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.105	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIMANTAP)	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIMANTAP)			-		-		-		-	1 Tahun	165.983.000	1 Tahun	165.983.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.106	Pengelolaan Data Anggaran	Tersedianya Dokumen Data Anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya			-		-		-		-	1 Dokumen	27.354.800	1 Dokumen	27.354.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.17.108	Penyusunan Laporan Operasional	Tersedianya Laporan Operasional			-		-					1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.109	Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian SKPD	Tersedianya Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian dari Bendahara Umum Daerah			-		-					1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			-	1 Peraturan Walikota	100.000.000	1 Peraturan Walikota	100.000.000	1 Peraturan Walikota	100.000.000	1 Peraturan Walikota	180.000.000	4 Peraturan Walikota	480.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.110	Penyusunan Laporan Neraca SKPKD	Tersedianya Laporan Neraca SKPKD			-		-					1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

																DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.20	Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen SPD dan SP2D			-	1 Dokumen	260.000.000	4 Dokumen	260.000.000	4 Dokumen	252.000.000	4 Dokumen	235.000.000	13 Dokumen	1.007.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.21	Pelaporan Dana Tugas Pembantuan	Tersedianya Laporan Keuangan Tugas Pembantuan yang Akuntabel			-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	75.000.000		-		-	2 Dokumen	175.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.22	Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Terlaksananya Rapat Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)			-			6 Kali	100.000.000	6 Kali	225.000.000	6 Kali	135.000.000	18 Kali	460.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.17.23	Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	Tersedianya Sistem Penggajian yang Muktahir			-	1 Tahun	254.620.000	1 Tahun	205.000.000	1 Tahun	165.000.000	1 Tahun	90.000.000	4 Tahun	714.620.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.24	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	35 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang Memahami Penatausahaan Keuangan Daerah			-	35 Bendahara Pengeluaran 11 Bendahara Penerimaan	100.000.000	35 Bendahara Pengeluaran 11 Bendahara Penerimaan	250.000.000	35 Bendahara Pengeluaran 11 Bendahara Penerimaan	240.000.000	35 Bendahara Pengeluaran 11 Bendahara Penerimaan	230.000.000	35 Bendahara Pengeluaran 11 Bendahara Penerimaan	820.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.25	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tersedianya Instrumen Kebijakan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Telah Ditetapkan Berdasarkan			-	2 Peraturan Walikota	100.000.000	2 Peraturan Walikota	100.000.000	2 Peraturan Walikota	100.000.000	2 Peraturan Walikota	42.114.800	8 Peraturan Walikota	342.114.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

		Peraturan Kepala Daerah														
1.20.1.20.0 5.17.26	Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	Tersedianya Dokumen Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD			-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	67.000.000	6 Dokumen	767.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.29	Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	Tertib Administrasi Kedinasan dan Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah/Tertib nya Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya			-	50 Buah Sertifikat	371.541.500	50 Buah Sertifikat	620.809.500	50 Buah Sertifikat	225.809.500	50 Buah Sertifikat	160.908.500	200 Buah Sertifikat	1.379.069.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.30	Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2016			-	36 SKPD	200.000.000	36 SKPD	200.000.000	36 SKPD	180.400.000	36 SKPD	-	36 SKPD	580.400.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.17.31	Pengendalian Administrasi Verifikasi	Terselenggara nya Proses Administrasi Verifikasi yang Akurat			-	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	48.250.000		-	3 Tahun	198.250.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.32	Pelaporan Pajak Orang Pribadi	Tersedianya Dokumen Pelaporan Pajak Orang Pribadi			-	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	450.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.33	Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	Tersedianya Dokumen Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji			-	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000		75.000.000	3 Dokumen	450.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.36	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	Tersedianya Alat Pengolahan Managemen Barang Daerah Kota Tasikmalaya			-			1 Paket SIMBADA	448.670.000	1 Paket SIMBADA	191.500.000			1 Paket SIMBADA	640.170.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.17.38	Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah			-	1 Dokumen	213.241.000	1 Dokumen	172.867.500	1 Dokumen	281.496.750	1 Dokumen	98.505.500	4 Dokumen	766.110.750	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.39	Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	Terlaksananya Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)			-		-	1 Tahun	78.250.000		-		-	1 Tahun	78.250.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.40	Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Tersedianya Dokumen Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya			-		-		-	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	28.569.000	4 Dokumen	103.569.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.17.41	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang			-	1 Dokumen	227.242.500	2 Dokumen	102.966.500	2 Dokumen	102.966.500	2 Dokumen	36.939.000	7 Dokumen	470.114.500	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.42	Pemindahtang anan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terselenggara nya Pemindahtang anan dan Penghapusan Barang Milik Daerah melalui Mekanisme sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan			-	1 Tahun	622.777.000	1 Tahun	493.952.000	1 Tahun	458.142.000	1 Tahun	159.975.000	4 Tahun	1.734.846.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.17.43	Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset sebagai Bahan Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel			-	6 Dokumen	110.774.000	6 Dokumen	160.774.000	6 Dokumen	130.000.000	6 Dokumen	89.178.500	24 Dokumen	490.726.500	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.44	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah			-	109 Buah Papan Nama Aset	75.000.000	51 Buah Papan Nama Aset	75.000.000	51 Buah Papan Nama Aset	75.000.000	103 Buah Papan Nama Aset	75.000.000	314 Buah Papan Nama Aset	300.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.45	Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah			-	Seluruh Pengurus Penyimpan Barang	415.424.000	Seluruh Pengurus Penyimpan Barang	287.401.500	Seluruh Pengurus Penyimpan Barang	289.401.500	Seluruh Pengurus Penyimpan Barang	84.941.500	Seluruh Pengurus Penyimpan Barang	1.077.168.500	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.17.47	Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Rancangan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			-	1 Peraturan Walikota	100.000.000	1 Peraturan Walikota	100.000.000	1 Peraturan Walikota	150.000.000	1 Peraturan Walikota	85.599.300	4 Peraturan Walikota	435.599.300	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.48	Konsolidasi Penggangan Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Penggangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya			-	6 Dokumen	100.000.000		-		-	36 Dokumen	27.354.800	42 Dokumen	127.354.800	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.50	Administrasi Penggangan Daerah	Tersedianya Administrasi Penggangan Daerah			-	1 Semester	75.000.000		-		-		-	1 Semester	75.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN

															DAN BARANG DAERAH	
1.20.1.20.0 5.17.51	Pengendalian Administrasi Laporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Laporan Keuangan Daerah			-	1 Tahun	75.000.000		-				-	1 Tahun	75.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.52	Pertanggungjawaban Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya			-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	350.000.000		-	4 Dokumen	500.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.53	Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tersedianya Dokumen Kendali Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	48.250.000	2 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	193.250.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.17.54	Verifikasi Dokumen Anggaran	Terlaksananya Verifikasi Dokumen Anggaran			-	-	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	340.360.000	1 Tahun	37.449.000	3 Tahun	477.809.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH		
1.20.1.20.0 5.17.58	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPKD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPKD			-	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	35.000.000	-	3 Dokumen	135.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH	
1.20.1.20.0 5.17.60	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPKD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPKD			-	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	325.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.61	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD			-	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	425.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.17.72	Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan	Tersedianya Dokumen Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan			-	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	50.000.000			-	3 Dokumen	210.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.73	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD)	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD)			-	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	224.600.000			-	3 Tahun	674.600.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.75	Rekonsiliasi Kas Daerah	Tersedianya Dokumen Pencatatan dan Pelaporan Kas Daerah yang Benar dan Akuntabel			-	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	90.000.000			-	3 Dokumen	315.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.83	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran			-	1 Tahun	75.000.000		-		-			-	1 Tahun	75.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN

		Pendapatan														BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.84	Rekonsiliasi Target Anggaran Pendapatan Daerah / Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	Tersedianya Dokumen Rekonsiliasi Target Anggaran Pendapatan Daerah			-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	392.886.200	1 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	107.713.300	9 Dokumen	875.599.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.85	Fasilitasi Anggaran Pendapatan Daerah	Tersedianya Dokumen Target Anggaran Pendapatan Daerah			-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	288.974.000		-		-	2 Dokumen	363.974.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.86	Penyusunan Administrasi Pelaporan Realisasi Kegiatan	Tersedianya Dokumen Administrasi Laporan Realisasi Kegiatan			-	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	165.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.17.88	Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Untuk Barang Daerah	Tersedianya Dokumen Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Untuk Barang Daerah			-	1 Dokumen	170.000.000		-				-	1 Dokumen	170.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.89	Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Tersedianya Laporan Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik			-	1 Dokumen	151.496.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	94.900.000		-	3 Dokumen	346.396.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.92	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual			-			36 SKPD	50.000.000	36 SKPD	350.000.000	36 SKPD	350.000.000	36 SKPD	750.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.17.93	Penyusunan Anggaran Kas	Tersedianya Anggaran Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya			-		-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	83.250.000		-	2 Dokumen	183.250.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.94	Fasilitasi Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Terfasilitasiny a Pembuatan NPWP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya			-		-	1 Tahun	50.000.000		-		-	1 Tahun	50.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.96	Fasilitasi Laporan Pertanggungja waban Fungsional dari Bendahara SKPD di Pemerintah Kota	Tersedianya Laporan Pertanggungja waban Fungsional dari Bendahara SKPD di Pemerintah Kota			-		-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	48.250.000		-	2 Dokumen	98.250.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

		Tasikmalaya														
1.20.1.20.0 5.17.97	Penghapusan Gedung/Bangunan Milik Daerah	Terselenggaranya Penghapusan Gedung/Bangunan Milik Daerah melalui Mekanisme sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan			-		-		-	1 Dokumen	55.774.000		-	1 Dokumen	55.774.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.99	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pengelolaan Barang Daerah	Tersedianya Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah			-		-		-	1 Peraturan Walikota	47.076.500		-	1 Peraturan Walikota	47.076.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.17.111	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Provinsi Tahun 2017)	Terlaksananya Rapat Koordinasi, Pelaporan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan			-		-		-			1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

		Daerah														
<b>1.20.1.20.05.23</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Terlaksananya a Pembangunan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah</b>			-		-		-		-		<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>	
1.20.1.20.05.23.05	Pembangunan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah	Terlaksananya Pembangunan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah			-		-		-		1 Paket		50.000.000	1 Paket	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
<b>1.20.1.20.05.26</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Jumlah Peraturan Daerah Yang Dibentuk</b>			-	<b>100%</b>	<b>307.161.000</b>	<b>100%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>832.161.000</b>	

1.20.1.20.0 5.26.10	Penyusunan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada PT. Bank Jabar Banten	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya Kepada PT. Bank Jabar Banten			-		-	1 Peraturan Daerah	25.000.000			-	-	1 Peraturan Daerah	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.26.13	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah			-		-	1 Peraturan Daerah	50.000.000			-	-	1 Dokumen	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.26.14	Penataan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Penataan Regulasi Pengelolaan Keuangan			-		-	1 Dokumen	100.000.000			-	-	1 Dokumen	100.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.26.18	Penyusunan Ketentuan Penyelenggara an Hibah dan Bantuan Sosial	Tersedianya Instrumen Pengendali Penyelenggara an Hibah dan Bantuan Sosial			-	1 Peraturan Walikota	157.161.000		-				-	1 Peraturan Walikota	157.161.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.26.20	Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Rancangan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah			-	1 Peraturan Walikota	75.000.000		-				-	1 Peraturan Walikota	75.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.26.21	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua	Tersedianya Rancangan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua			-	1 Peraturan Walikota	75.000.000	1 Peraturan Walikota	50.000.000				-	2 Peraturan Walikota	125.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.1.20.0 5.26.22	Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua	Tersusunnya Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua			-		-			1 Peraturan Walikota	300.000.000			-	1 Peraturan Walikota	300.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.05.28	<b>Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Unit Pelayanan Yang Memiliki SOP/ ISO</b>			-		-	<b>1 Dokumen</b>	<b>60.000.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	-	<b>1 Dokumen</b>	-	<b>1 Dokumen</b>	<b>60.000.000</b>		
1.20.1.20.05.28.13	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)			-		-	1 Dokumen	60.000.000		-		-	1 Dokumen	60.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH	
1.20.1.20.05.35	<b>Program Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan</b>	<b>Peningkatan Pendapatan Daerah</b>			-	<b>100%</b>	<b>275.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>255.000.000</b>		<b>176.784.800</b>	<b>100%</b>	<b>1.006.784.800</b>		

	<b>Daerah</b>															
1.20.1.20.0 5.35.03	Penatausahaan Bantuan Provinsi	Tersedianya Fasilitasi Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi			-	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	130.000.000	1 Tahun	76.784.800	4 Tahun	506.784.800	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.35.04	Penatausahaan Dana Transfer	Tersedianya Laporan Realisasi Dana Transfer			-	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	500.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
<b>1.20.1.20. 05.37</b>	<b>Program Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan</b>	<b>Terlaksananya a Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan</b>			-	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>423.076.750</b>		-	<b>100%</b>	<b>748.076.750</b>	
1.20.1.20.0 5.37.02	Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis			-	1 Dokumen	100.000.000		-		-		-	1 Dokumen	100.000.000	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

		Akrual														
1.20.1.20.0 5.37.03	Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah			-	1 Kegiatan	100.000.000		-				-	1 Kegiatan	100.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.37.04	Sosialisasi Aplikasi Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Aplikasi Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah			-	1 Kegiatan	-	75.000.000	1 Kegiatan	350.000.000			-	2 Kegiatan	425.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.37.07	Sosialisasi Penataan Regulasi Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Sosialisasi Penataan Regulasi Pengelolaan			-	1 Kegiatan	-	50.000.000					-	1 Kegiatan	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

	Daerah	Keuangan Daerah														BARANG DAERAH
1.20.1.20.0 5.37.10	Sosialisasi Permendagri No. 19 Tahun 2016	Terlaksananya Sosialisasi Permendagri No. 19 Tahun 2016			-	-	-	-	1 Kegiatan	73.076.750		-	1 Kegiatan	73.076.750		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
<b>1.13.1.20.05.21</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Meningkatnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial</b>			-	<b>100%</b>	<b>527.504.000</b>	<b>100%</b>	<b>461.660.000</b>	<b>100%</b>	<b>406.760.000</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.470.924.000</b>	
1.13.1.20.0 5.21.24	Penyusunan Laporan Hibah dan Bantuan Sosial	Tersedianya Laporan Hibah dan Bantuan Sosial			-	1 Dokumen	130.111.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	94.900.000		-	3 Dokumen	325.011.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1.13.1.20.0 5.21.25	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial			-	1 Kegiatan	397.393.000	1 Kegiatan	361.660.000	1 Kegiatan	311.860.000	1 Kegiatan	75.000.000	4 Kegiatan	1.145.913.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG

																DAERAH
1.06.1.20.05.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah			-		-		-		-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	
1.06.1.20.05.21.XX	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah BPKBD	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah BPKBD			-		-		-		-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
<b>TOTAL</b>					-		<b>11.071.181.000</b>		<b>10.911.903.100</b>		<b>14.267.676.000</b>		<b>6.160.811.000</b>		<b>42.411.571.100</b>	

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA BPKBD**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah ukuran yang ditetapkan oleh suatu organisasi perangkat daerah yang bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya indikator kinerja ini harus dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dihitung, diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, visi dan misi organisasi..

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi dalam suatu organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai sesuai harapan.

Indikator kinerja BPKBD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKBD dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 6.1. sebagai berikut :

**Tabel 6.1. Indikator Kinerja BPKBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan	Kondisi	Target Capaian Kinerja			
		2013	2014	2015	2016	2017
	<b>Indikator Kinerja</b>					
1	Persentase Waktu Penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya yang Tepat Waktu		31 Desember 2014 (100%)	31 Desember 2015 (100%)	31 Desember 2016 (100%)	31 Desember 2017 (100%)
2	Persentase Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Kepada BPK		31 Maret 2014 (100%)	31 Maret 2015 (100%)	31 Maret 2016 (100%)	31 Maret 2017 (100%)
3	Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Keuangan Melalui Sistem		100%	100%	100%	100%

4	Persentase Keberadaan Barang Milik Daerah		85%	87%	90%	92%
5	Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Pengelolaan Barang Daerah Melalui Sistem		100%	100%	100%	100%

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) BPKBD Kota Tasikmalaya merupakan arah dan pedoman perkembangan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Renstra juga merupakan manifestasi dari respons BPKBD Kota Tasikmalaya terhadap perkembangan kondisi lingkungannya baik internal maupun eksternal yang memerlukan pengamanan yang akurat serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang selalu mengalami perubahan, maka Restra BPKBD Tahun 2014-2017 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus selalu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam perubahan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Visi, Misi, Tujuan serta sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis BPKBD hanya akan tercapai apabila terdapat komitmen dari seluruh komponen dilingkungan BPKBD untuk bersama mewujudkannya dengan dilandas inilai-nilai organisasi yaitu profesionalisme, kreativitas dan disiplin.

Demikian Rencana Strategis BPKBD Kota Tasikmalaya Tahun 2014–2017 dibuat, semoga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKBD.

Tasikmalaya, 4 Januari 2016  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah  
Kota Tasikmalaya

TTD

**Drs. H. NANA SUJANA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680803 198903 1 004